

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK
LAUT KECAMATAN BESUKI SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh:
Fathimah Shalehah
NIM. C06216006



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya

2020

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI
TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT KECAMATAN BESUKI
SITUBONDO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh:
Fathimah Shalehah
NIM. C06216006**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathimah Shalehah
NIM : C06216006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Pandangan Tokoh
Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama
Kecamatan Besuki terhadap Hukum Praktik Petik
Laut Kecamatan Besuki Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 November 2019



akan,
Fathimah Shalehah
NIM. C06216006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fathimah Shalehah dengan NIM. C06216006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Dosen Pengampu,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fathimah Shalehah NIM.C06216006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sarjana satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. Ach. Fajrullah Fapva, S.Ag, SH,
MHI, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Dr. H. Nafi Mubarak, SH. MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji III,

H. Muhammad Ghufiron, Lc. MHI.

NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 16 Maret 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo?, dan Bagaimanan analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data yang diperoleh menggunakan wawancara beserta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya tentang pendapat tokoh Muhammadiyah dan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut boleh dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terdapat kepercayaan yang mendekati syirik. Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut tidak boleh dilaksanakan, karena di dalam pelaksanaannya mengandung unsur *tabzir* dan khawatir di dalam pelaksanaannya menimbulkan perkara yang mendekati syirik. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama memiliki persamaan dalam menetapkan hukum praktik petik laut, yakni sama sama mengatakan tidak boleh ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan kepercayaan yang mendekati syirik. Perbedaan sudut pandang, tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari praktik petik laut adalah boleh, karena dapat dijadikan momen dakwah yang di *qiyaskan* terhadap kbolehan melaksanakan Maulid Nabi, dalam penerapan praktik petik laut menyimpan banyak masalah, sedangkan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama adalah tidak boleh, karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak *tabzir* dan dikhawatirkan adanya kepercayaan yang mendekati syirik.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni tokoh Muhammadiyah membolehkan melakukan upacara petik laut dengan syarat tidak ada faktor yang mendekati syirik, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak boleh melaksanakan upacara petik laut karena dalam pelaksanaan upacara petik laut mengandung unsur tabzir dan di khawatirkan adanya perkara yang mendekati syirik, boleh dikakukan dengan syarat hal yang mendekati tabzir dihilangkan. Persamaannya sama sama tidak boleh melaksanakan upacara petik laut jika terdapat perkara yang mendekati syirik. Perbedaannya tokoh Muhammadiyah boleh dengan dasar dijadikannya momen dakwah, tokoh Nahdlatul Ulama tidak boleh melakukannya atas dasar tabzir, akan tetapi boleh melaksanakannya dengan syarat perkara yang mengandung *tabzir* dihilangkan.

Saran untuk masyarakat nelayan seharusnya dalam melakukan upaca petik laut tidak dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan perkara yang menyalai syariat di dalamnya, cukup melakukan sekedarnya saja.

MOTTO

“وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يَبُغُ عَنْكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا” (Al-Qur’an Al-Isra’: 23)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah.....	6
C. Rumusan masalah.....	7
D. Kajian pustaka.....	8
E. Tujuan penelitian	12
F. Kegunaan penelitian.....	13
G. Definisi operasional.....	14
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika pembahasan.....	21
BAB II METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	
A. Metode Istinbat.....	23
1. Pengertian Istinbat Hukum	23
2. Pembagian Metode Istinbat.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara yang mempunyai beberapa sejarah keberagaman yang unik dan menarik. Pada masa sebelum datangnya agama Budha dan agama Hindu, masyarakat penduduk Indonesia menjadi masyarakat yang tersusun, sederhana, serta teratur.¹ Pada masa itu, masyarakat Indonesia banyak berfikirn mempercayai kekuatan-kekuatan roh ghaib yang biasa disebut roh para nenek moyang.

Upaya masyarakat dalam memperçayai roh ghaib yaitu dengan cara melakukan penyembahan sebagai bentuk penghormatan. Penyembahan tersebut mengharapkan agar semua keluarganya dilindungi dari berbagai roh-roh jahat yang kemudian juga bisa mendapatkan bantuan dari roh-roh yang baik atas aktivitas kesehariannya beserta kesehatannya.² Setelah berabad-abad kemudian masyarakat Indonesia mulai menjadikan bagian dari budaya tentang perkara seperti halnya penghormatan kepada nenek moyang, serta pandangan-pandangan lainnya.³

¹ Damardjati, *Islam Jawa*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), 79-80.

² Hostifawati, “Syukuri Hasil Tangkapan Masyarakat Probolinggo Gelar Petik Laut”, Kabarpas.com, Probolinggo, diakses pada 16 September 2019.

³Nur Aeni, Jurnal, "Ritual Petik Laut Dan Keragaman", *Empirisma*, Vol 26 No 1 (Januari, 2017), 165.

Masyarakat setempat Besuki melakukan upacara petik laut dengan harapan supaya para nelayan bisa dianugerahi hasil laut yang lebih melimpah dari sebelum-sebelumnya, sama halnya dengan budaya sesembahan laut lainnya. Kebanyakan masyarakat mempercayai dan meyakini bahwa di setiap laut pasti memiliki penunggu “*penjaga makhluk ghoib*”.⁵

Adat yang berkembang di kalangan masyarakat adakalanya adat yang baik dan juga adapula yang buruk, dalam teori hukum Islam, adat yang diperbolehkan hanya adat yang baik saja, sedangkan adat yang buruk harus ditinggalkan.⁶ Islam adat yang baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.⁷

Apabila dilihat dari segi kebudayaannya, dalam Islam memperbolehkan praktik pelaksanaan petik laut ini, dikarenakan adat

⁵ Widya Wulandari, "Mitos Dalam Upacara Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi", (Skripsi-. Universitas Jember. Jember. 2013). 3.

⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 78.

perayaan petik laut adalah adat istiadat yang prinsipnya tidak menyalahi hukum syariat,⁸ mengingat bahwa adanya hukum *‘Urf* yakni suatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Sebagaimana dalam Kaidah Fiqhiyah⁹:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Atau dalam definisi lain, yaitu:

الْعُرْفَ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدَاهُ فِي أَقْوَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرَّدًا أَوْغَالِيًّا

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya-dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”

Dari definisi sebelumnya, terdapat dua hal penting, yaitu: di dalam *al-'adah* terdapat unsur yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam *al-'urf* terdapat unsur yang dikenal sebagai sesuatu yang baik.¹⁰

Berdasarkan dengan penguat yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Al-A'rof:199 adalah sebagai berikut¹¹:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978), 89.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: kencana, 2008), hlm 418.

¹⁰ A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), 80.

¹¹ Ibid., 81.

Adat yang telah berlangsung lama dan secara substansial dalam acara pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.¹² Adat yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang telah disikapi dan dipahami, yang kemudian dilaksanakan oleh kesadaran masyarakat sekitar.¹³

Pada hari pertama, sebelum hari pelepasan sesaji ke laut, masyarakat nelayan bersama penduduk desa melangsungkan acara pembacaan yasin yang disertai dengan tahlil di masjid-masjid terdekat. Berkelanjutan hingga keesokan harinya dengan acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an (*khataman*) yang dilangsungkan di pinggiran laut. Dan kemudian di lanjutkan pada malam harinya seputar pengajian yang di isi dengan ceramah-ceramah oleh para tokoh terkemuka.¹⁵

¹⁵ Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019

Acara petik laut ini terdapat segi negatif dan juga segi positif, yang mana dalam segi positifnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa petik laut adalah sebuah rasa syukur kepada Allah SWT dengan menggunakan berbagai simbolik menggunakan beberapa makanan yang disajikan dalam kata lain sesajen. Sedangkan dalam segi negatifnya yaitu, yang mana menyebabkan sebagian masyarakat membuang suatu perkara yang seharusnya masih bisa di pergunakan dengan baik.¹⁸

Petik laut yang dilaksanakan di Daerah Besuki Situbondo adalah topik yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan yang pertama, dalam pelaksanaan petik laut sangat mengikat pada

18 Adiba Zahrotul Wildah, "Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdayong Pemalang", (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 4.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumsukkan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitiannya akan menfokuskan tentang bagaimana sebenarnya hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah dan juga pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki. Penelitian ini berjudul “Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo.”

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah¹⁹, atau dalam artian lain salah satu proses untuk menguasai serta mengetahui permasalahan dalam situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi yang kemudian ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yang akan disebutkan sebagai berikut:

¹⁹ Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

- #### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang praktik petik laut ini juga menemukan beberapa literatur yang pernah diteliti dan masih berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

- ²⁰ Tomi Latu Farisa, “Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur”, (Skripsi-, Universitas Islam Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

- ²¹ Widya Wulandari, “Mitos Dalam Upacarat Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi”, (Skripsi-, Universitas Jember, Jember, 2013).

²² Ali Wildan Tahun, “Tradisi Sedekah Laut Dalam Etika Ekologi Jawa (di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal), (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

[illegible]

5. Skripsi yang ditulis oleh Adiba Zahrotul Wildah Tahun 2018, Mahasiswa Prodi Studi Agama Agama Fakultas asuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdayong Pemalang. Dalam penelitian terdahulu ini menfokuskan tentang nilai nilai islam yang ada dalam ritual sedekah laut.²⁴ Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama sama membahas tentang ritual petik laut atau dalam kata lain sedekah laut. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang nilai nilai islam yang ada dalam ritual sedekah laut, sedangkan penelitian ini akan menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

Penelitian dan tulisan yang telah di paparkan, belum di jelaskan secara rinci tentang hukum menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

F. Kegunaan Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 18.

berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan yang dimaksud diantaranya:

1. Dari Aspek Keilmuan (segi teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Besuki, agar supaya mereka memahami terkait beberapa konsep hukum adat tentang praktik petik laut, kemudian memahami tentang hukum praktik petik laut itu sendiri dari pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki.

2. Dari Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan dedikasi atau bantuan terhadap masyarakat supaya bisa lebih mengetahui tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu pengertian atau pedoman yang kemudian bisa digunakan untuk mempermudah memahami berbagai pembahsan dalam beberapa kegiatan. maka dirasa perlu untuk memberi penjelasan dari beberapa istilah berikut ini:

1. Jenis penelitian

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang praktik petik laut di Daerah Besuki yang diambil dari kantor Desa di Daerah Besuki Situbondo.
- b. Data foto dari prosesi petik laut di Daerah Besuki yang diambil dari kantor Desa di Daerah Besuki Situbondo.

Sumber data adalah kumpulan data yang penting dalam suatu penelitian.³¹ Untuk memperoleh beberapa data yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti harus memahami tentang dua sumber data ini, diantaranya sebagai berikut:

Sumber data yang dapat memberikan informasi utama melalui prosedur, yang kemudian langsung kepada pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview*, observasi beserta dokumentasi.

Berdasarkan dari sumber primer ini, peneliti akan mendapatkan beberapa informasi dengan mewawancara terhadap sejumlah di antaranya:

- 1) Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Dacrag Besuki meliputi: Tokoh yang terpendang di Daerah Besuki, Ketua Muhammadiyah Besuki beserta Ketua Nahdlatul Ulama Besuki.
- 2) Kepala Desa Kecamatan Besuki Situbondo.

[illegible]

- a. Sumber data sekunder

- 1) Data yang masih berkaitan dengan profil Kecamatan Besuki Situbondo.
- 2) Beberapa dokumentasi yang berupa foto tentang ptaktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
- 3) Beberapa data dan buku-buku yang masih berkaitan dengan pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

- a. Teknik pengumpulan data

Tektik pengumpulan data adalah suatu perkara atau suatu langkah yang dapat melancarkan jalannya penelitian,³² tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data yang dibutuhkan.

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan-keterangan lisan dengan melalui percakapan dengan orang yang

³² Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

dituju kemudian dapat memberikan keterangan yang diinginkan peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang tertata dengan baik, dengan membuat beberapa daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

Pihak-pihak dalam pelaksanaan wawancara ini diantaranya, pihak pertama adalah sebagai penanya yaitu peneliti sendiri, sedangkan pihak kedua adalah orang yang dapat disebut sebagai narasumber atau orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penanya. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Tokoh Muhammadiyah yakni ketua Muhammadiyah Besuki Situbondo dan Tokoh Nahdlatul Ulama yakni ketua Nahdlatu Ulama Besuki Situbondo, masyarakat setempat serta Kepala Desa Kecamatan Besuki Situbondo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi yang dibutuhkan meliputi catatan peristiwa petik laut yang telah berlalu yang dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, dan gambar yang diambil pada waktu pelaksanaan petik laut.

b. Teknik pengolahan data

- a. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Mengumpulkan data surat-surat pra acara petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
- b. Dengan menggunakan *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang sudah diperoleh, dengan dilakukan setelah menghimpun data-data di lapangan.³³ Memeriksa kembali seluruh data-data acara petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
- c. *Analizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁴ Menyusun kembali data-data yang diperoleh dari acara petik laut Besuki Situbondo dengan menganalisis dari kerangka yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah.

c. Teknik analisis data

³⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Metode komparatif adalah membandingkan satu objek dengan objek lainnya yang berada dalam fase pertumbuhan yang sama.³⁶ Peneliti ini menganalisis komparatif tentang “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki Tentang Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo.

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

³⁵ Ibid., 291.

[illegible]

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai, “Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.

Bab *Ketiga*, bab ini merupakan pembahasan tentang “hasil penelitian pembahasan serta pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo”.

Bab *Keempat*, bab ini membahas tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo”.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) *Amar* (perintah), *nahī* (larangan), dan *takhyīr* (memberikan pilihan)

Contoh *Amar* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.”¹¹

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*....,113

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Contoh *takhyīr* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ ۚ وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,..., 89

2) lafal dari segi umum dan khusus

Contoh lafal umum dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat
hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Contoh lafal khusus dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat al-Maidah ayat 89:

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,..., 222

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”¹⁷

Lafal *mutlaq* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah suatu satuan lafal yang menunjukkan pengertian tanpa Batasan sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit,¹⁸ sedangkan *Muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,..., 122
¹⁸ Romli Sa, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 272.
¹⁹ Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushul Fiqh*....., 275.

Contoh lafal *Muqayyad* dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”²¹

4) Lafal dari segi *manṭūq* dan *mafḥūm*

lafal *manṭūq* adalah lafal yang diucapkan secara *harfiyah*²², sedangkan *mafḥūm* adalah lafal yang dipahami dari

²² Mardani, *Ushul Fiqh*....., 310.

Contoh lafal *manṭūq* dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”²⁴

Contoh lafa 1 *mafhūm* dalam Al-Qur'an juga terdiri dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”²⁵

5) lafal dari segi majaz dan segi hakikatnya

²⁵ Ibid, 284

Contoh lafal dari segi majaz seperti halnya lafal *Asad* yang pada hakikatnya memiliki makna singa, kemudian pada saat tertentu diartikan sebagai berani.

lafal yang dilihat dari segi jelas dan tidak jelasnya dalam kategori ini dibagi menjadi enam bagian, diantaranya:²⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁶ Beni Ahmad Saebeni, Januri, *Fiqh Ushul FIqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 281.

[illegible]

b) *Dzāhir*²⁹ contoh dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3:

“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”³⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan

³¹ Lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci. (Satria Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh.....*,224).

d) *Muhkām*³³, contoh dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“dan apabila kamu menceritakan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahad untuk mendzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mendzolimi dirinya sendiri. dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu.”³⁴

e) *Mujma*^{β5}, contoh dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ

³⁵ Lafal yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafal lain, dilihat dari aspek sifatnya, ketentuannya, atau kadarnya. (Mardani, *Ushul Fiqh.....*,324).

f) *Mubayyan*³⁷, contoh lafal dalam segi mubayyan seperti halnya penjelasan nabi terhadap penerpan sholat dan haji:

صلوا كما رايتموني اُصلي

“Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat.”³⁸

b. Metode Istinbat Melalui pendekatan *Maqāsid Sharī'ah*

Maqāsid Sharīah dengan arti tujuan Allah merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur’andan hadis sebagai alasan yang logis untuk rumusan hukum terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan semua umat manusia.³⁹

Pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat hukum, seperti halnya

³⁷ Lafal yang dapat dipahami maksudnya dari makna aslinya ataupun setelah dijelaskan makna dari lafalnya. (Mardani, *Ushul Fiqh.....*,324).

³⁹ Satria Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh.....*, 212.

- Unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya jika pandangan para mujtahid terjadi *ta'arūd* antara dua dalil, maka harus menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya⁴⁶, diantaranya:
- Mengompromikan antara dua dalil, dengan memfungsikan keduanya.
 - Jika tidak dapat di kompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjīh*.
 - Jika tidak dapat hasil dari jalan *tarjīh* antara keduanya, maka langkah setelahnya meneliti mana yang lebih dahulu datangnya antara kedua dali tersebut, setelah dapat diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah dibatalkan.

⁴⁶ Muḥammad Ḥasan Hitu, *Uṣūlu al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Beirut: Jamī'u al-Huqūq Mahfūzatu Linnāsir, 2000), 118.

2) *Tarjīḥ*

Seperti yang dikemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *al-Ahkām* adalah:

عِبَارَةٌ عِنَاقِرَانِ الصَّاحِبَيْنِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَاهْتِمَالِ الْآخَرِ

Ali Ibnu Saifuddin al-Amidi dari ahli ushul fiqh kalangan Syafi'iyah membagi metode *tarjīh* dalam tiga bagian, diantaranya:⁵¹

⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh....*, 243.

perbuatan atau perkataan dengan cara meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁵³

Kaidah-kaidah ini dapat menunjukkan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam *nāṣh*, juga dapat mengetahui sumber hukum yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan antara dua sumber hukum, kemudian juga dapat mengetahui perbedaan pendapat bagi ahli fiqh dalam menetapkan hukum dari suatu perkara tertentu.⁵⁴

Permasalahan-permasalahan yang berada di masyarakat terkadang sudah ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah, adapula yang ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah akan tetapi tidak secara perinci, hanya berupa prinsip-prinsip umum, jika disandingkan dengan zaman setelah Rasulullah yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang belum terdapat sumber hukumnya secara jelas dan perinci, maka dalam penerapannya diperlukan beberapa penalaran secara khusus, seperti halnya dilakukan istinbat hukum dengan mengeluarkan hukum-hukum baru berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an beserta Sunnah Rasulullah⁵⁵.

B. Metode Istinbat Muhammadiyah

1. Lembaga Muhammadiyah

⁵³ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 7.

⁵⁴ Halimatus Sakdiyah, “Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid”, (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jakarta, 2019), 32.

⁵⁵ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), 29.

Muhammadiyah adalah organisasi terkenal akan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam, lebih memperhatikan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan aspek kehidupan, didirikan oleh Muhammad Darwis. Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, kelahiran Yogyakarta Tahun 1869. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M. Muhammadiyah sebagai organisasi.⁵⁷

Muhammadiyah memiliki bidang tertentu yang memfokuskan terhadap fatwa yang dibentuk atas dasar hasil keputusan kongres Muhammadiyah yang ke-16 tahun 1927 di pekalongan dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim, yang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam organisasi Muhammadiyah, bertujuan agar supaya dapat memayungi dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Gandhung Fajar Panjalu, *Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Tesis, (Surabaya: UIN Surabaya, 2016), 71.

Istinbat hukum dalam organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah diartikan sebagai wujud mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *dzanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh para pakarnya.⁶⁰ Adapun istinbat hukum Majelis Tarjih adalah:

Sumber hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Al-Qur'andan *al-Sunnah al-maqbūlat*.⁶¹

Metode istinbat yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ada 3 macam antara lain;

⁶¹ Sunnah yang berkualitas shahih dan hasan, serta bisa di terima (*makbul*) oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

- Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah:

- 1) *At-tafsir al-ijtimā'i al-mu'aşir* (hermeneutik)
- 2) *At-tarikhi* (historis/ sejarah)
- 3) *Al-susiuluji* (sosiologi)
- 4) *Al-antrubuluji* (antropologi)⁶²

Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu:⁶³

⁶³Muhammad Kholis, *Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi*, Skripsi, (Surabaya: UIN Surabaya, 2015), 24-30.

1. Lembaga Nahdlatul Ulama

Awal berdirinya LBM disebut sebagai adalah ketika Kongres / Mukhtar 1, yang kemudian diresmikan pada Mukhtar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, atas rekomendasi komisi 1 (*masāil diniyah*) kepada PBNU untuk membentuk “*Lajnah Bahtsul Masāil Diniyyah*”

[illegible]

Bahtsul Masail atau Lembaga *Bahtsul Masā'il Diniyah* (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah salah satu lembaga yang memunculkan fatwa-fatwa hukum keagamaan terhadap umat Islam.

Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail
adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah
yang mauquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian
hukum.

2. Metode Istinbat

Tatacara pengambilan keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu dengan mengikuti pendapat dari empat mazhab. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode *Qauliy*

Qauly berarti pendapat.⁶⁶ Dalam metode ini yang dimaksud dengan metode *qauly* adalah metode penetapan hukum yang

⁶⁶ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail* (Volume 7 No.2, 2013), 196.

- 1) Jika dalam suatu kasus sudah ada jawabannya dari kitab dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul/wajh*), maka pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukumnya.
- 2) Jika dalam suatu kasus sudah ada jawabannya dari kitab dan terdapat lebih dari satu pendapat (*qaul/wajh*), maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu pendapat (*qaul/wajh*).⁶⁷ Ketentuan memilih satu pendapat diantara dua pendapat yaitu dengan cara mengambil pendapat yang lebih maslahah dan lebih kuat. Serta menyelesaikan dengan cara memilih Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama dan Pendapat yang paling wara'.

Ilhāqi berarti analogi.⁶⁸ yaitu menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dalam suatu kitab dengan suatu kasus atau masalah serupa yang

⁶⁸ Ibid., 197.

c. Methode *Manhājī*

Manhājī berarti metodologis. Dan pengertian metode manhaji adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawāid al-Uṣhuliyah*). Metode ini dilakukan dengan melalui ijtihad *jamāʿī* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah). Metode ini dipakai jika dalam kasus fiqh tersebut tidak dapat dipecahkan dengan *ilhāq*, maka ketika tak mungkin dilakukan *ilhāqī*.⁶⁹

[illegible]

BAB III

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP
HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH BESUKI
SITUBONDO**

A. Gambaran Umum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

1. Sejarah Singkat Kecamatan Besuki

Raden Bagus Kasim al Wirodipuro dengan nama panggil Kyai Pate Alos lahir pada bulan Rabiul Awal 1162 H / 1741 M minggu ketiga, bertempat di Tanjung Jambul Pamekasan Madura. Kyai Pate Alos adalah putra dari Raden Abdurahman al Wirobroto, yakni Orang yang pertamakali membabad tanah Besuki. Kyai Pate Alos adalah cucu dari Raden Abdullah Surowikromo yang masih keluarga KRATON MATARAM (Susuhunan Pakubuwono II) dan akhirnya menetap di Tanjung Jambul Pamekasan Madura.¹

Asal mula tanah Besuki, berawal ketika Raden Abdurahman al Wirobroto berhijrah pada 10 Asyuro 1164 H / 1743 M ke desa Demung, dikarenakan pada saat itu di Daerah Tanjung Jambul Pamekasan terjadi NEMOR KARA (kemarau panjang) yang menyengsarakan rakyat. Raden Wirobroto memutuskan berhijrah ke tanah Jawa dengan tujuan agar supaya mendapatkan tanah baru untuk bercocok tanam, kemudian Beliau memilih Desa Demung dan membuka hutan disana, setelah beberapa saat kemudian Raden

¹ data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,

Berita tentang hasil panen Raden Wirobroto yang melimpah ruah tersebut didengar oleh Tumenggung Sentong tidak lain salah satu penguasa di Desa Demung. Tumenggung memanggil Raden Abdurrahman Wirobroto, Namun Raden Abdurrahman Wirobroto tidak menanggapi panggilan dari Tumenggung Sentong, sehingga mengakibatkan terjadinya peperangan. Tercatat Tumenggung Sentong menyerang Demung sebanyak tiga kali, akan tetapi gagal dan akhirnya Tumenggung Sentong berserahdiri pada Raden Abdurrahman Wirobroto.³

Tumenggung Banger mengetahui bahwa Demung semakin ramai, kemudian meminta kepada Raden Bagus Kasim untuk memindahkan Kademangan ke arah barat yang tidak jauh dari Demung dengan sebutan BESUKI yang artinya: “Barang siapa yang berniat tidak baik maka akan kembali pada pelakunya sendiri”.

³ data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,

- a. Raden Bagus Kasim diminta bantuan oleh Kompeni Belanda untuk menyerang Sentong dan kemudian Sentong berhasil dikalahkan.
- b. Raden Bagus Kasim juga diminta bantuan oleh Belanda bersama Tumenggung Banger dan Tumenggung Pasuruan untuk menyerang Lumajang dan usaha tersebut berhasil.⁴

Raden Bagus Kasim wafat pada minggu pertama bulan Rajab 1221 H/1800 M di makamkan di Besuki, dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Syahirudin dengan gelar yang sama WIRODIPURO 2, wafat pada minggu pertama bulan Rajab 1271 H/1850 M di Besuki, Dusun Kauman Barat Besuki Situbondo-Jatim. Masyarakat Besuki memberingati hari wafat di setiap tahunnya, yang ditempatkan di Pasarean Asta Pate Alos.



Gambar 1. Pesarean Asta Pate Alos.

⁴ data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,



Gambar 2. Tempat pengangkatan Wirodipuro sebagai Demang Besuki.
(Pendopo Besuki)

Dalam kata lain Besuki dimulai dari datangnya Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto yang memabat hutan belantara yang dikadikan pertanian di dusun Tajung desa Demung Kecamatan Besuki pada tahun 1742 M, dan mengakibatkan terjadinya rebutan oleh Tumenggung Sentong dan Tumenggung Banger.

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang letaknya berada di bagian selatan Kabupaten Situbondo dengan posisi kantor kecamatan berada pada 7° 4' Lintang Selatan dan 113° 41' Bujur Timur.

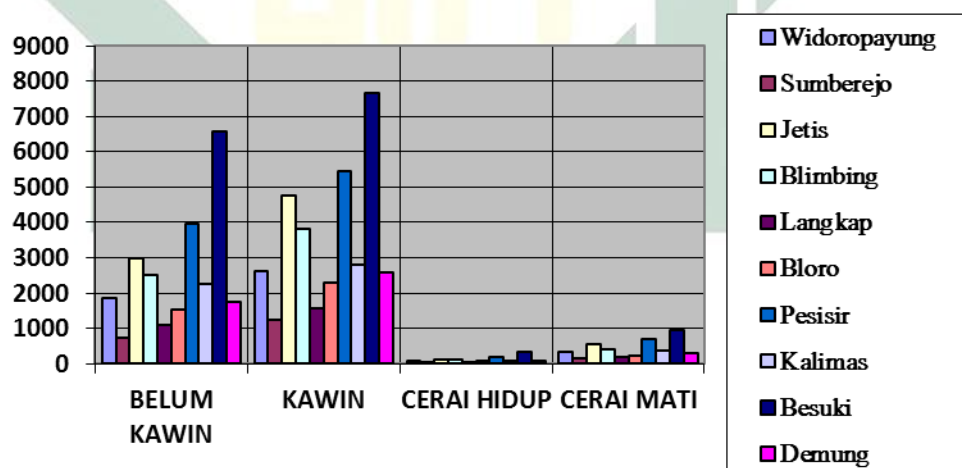
[illegible]

b. Batas Wilayah

- 1) Utara : Selat Madura
- 2) Timur : Kecamatan Suboh
- 3) Selatan : Kec. Sumbermalang dan Kec. Jatibanteng
- 4) Barat : Kecamatan Banyuglugur

Wilayah Kecamatan Besuki terbagi 10 desa/kelurahan, yaitu, Desa Bloro, Desa Langkap, Desa Blimbing, Desa Widoropayung, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Kalimas, Desa Demung, Desa Pesisir, dan Desa Besuki. Jumlah penduduk Kecamatan Besuki tahun 2019 mencapai 65.364 jiwa dengan komposisi 32.291 jiwa Laki-laki dan 33.073 jiwa Perempuan.⁵

Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo⁶

⁵Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri

⁶ Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri

Indonesia memiliki berbagai ragam suku bangsa dan bahasa, serta memiliki banyak tradisi dan upacara adat, dari berbagai ragam suku bangsa, hal ini yang kemudian menjadikan suatu pelaksanaan mutlak untuk dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sekitar. sejak dahulu ada upacara adat dengan tradisinya yang bermacam-macam. Salah satu diantaranya tradisi upacara pelaksanaan tasyakuran laut yang biasa dinamakan dengan sebutan “Petik Laut”, dari nama tersebut dapat diketahui bahwa tradisi ini memiliki hubungan erat dengan para nelayan dan kelautan. Mengingat pula di Daerah Pantura adalah Daerah yang merupakan bagian pesisir pantai hingga penduduknya mayoritas para nelayan.¹⁰

[illegible]

Para nelayan sebagian mempunyai keyakinan bahwa dilaut terdapat penguasa *ghaib*, yang kemudian masyarakat nelayan memberikan persembahan, supaya mereka terhindar dari murka penguasa *ghaib* yang berada didalamnya, namun disisi lain yang tak kalah penting, para nelayan juga menyatakan dengan adanya pernyataan syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Para nelayan juga merasa, bahwa adanya hasil perolehan laut yang didapat bukanlah semata berkat kemahiran mereka dalam menangkap ikan, ataupun berkat kecanggihan alat yang dipakainya, melainkan pemberian dari Allah SWT.

Upacara petik laut dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa paceklik, sehingga hasil tangkapan ikan sangat baik. Upacara petik laut juga termasuk babakan atau permulaan atau masa awal. Secara garis besar upacara petik laut adalah upacara komunal yang diikuti oleh masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat Muhammadiyah.¹²

tra, Masyarakat Nelayan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019
a, *Islam Pesisir*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm 183

¹² Nur Syam, *Islam Pesisir*. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm 183

Berdasarkan menurut Muhammad Subhan selaku pegawai Kecamatan juga masyarakat nelayan Besuki mengatakan:

Acara pelaksanaan upacara Petik Laut atau tasyakuran laut bagi masyarakat nelayan muslim di Daerah Besuki yang diadakan setiap tanggal 15 Rojab (*Tera'an*) tiap tahunnya, lebih tepatnya pada malam purnama. Acara petik laut dilaksanakan secara meriah juga besar-besaran dari tahun ketahun, dengan harapan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan dari masyarakat luar Daerah Besuki. Adapun yang dimaksud masyarakat luar Daerah Besuki adalah masyarakat yang tidak bertempat tinggal di Daerah Besuki, dalam kata lain adalah warga yang bukan penduduk asli dari Desa Besuki sendiri.

¹⁴ Ibid.,

Persiapan yang dilakukan masyarakat nelayan Besuki tidak melakukannya secara dadakan, masyarakat nelayan membentuk kepanitiaan dalam acara pelaksanaan petik laut dari sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan. Mereka juga menghias kapal mereka masing masing dengan seindah mungkin dalam jangka waktu sekitar satu minggu sebelum acara pelaksanaan petik laut dengan menggunakan bahan hiasan apa adanya. Sebagian besar bahan yang digunakan menghias perahu mereka dengan memanfaatkan lembaran kain *umbul-umbul*, dan beberapa kain dengan berbagai macam warna. Tidak hanya

¹⁶ Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019.

Arak arak sesaji setelah tiba di dermaga, kemudian acara petik laut dimulai dan para nelayan bersama-sama membaca doa dan sholawat kemudian berebutan menuju perahu masing masing untuk mengiringi perahu yang berisi sesaji. Perahu yang berisi bahan sesaji berlayar sejauh kurang lebih tiga kilometer, kemudian menaburkan sesaji yang sudah disediakan kedalam laut dengan diiringi bacaan takbir bersama dan Sholawat Nabi. Setelah penaburan selesai, kapal sesaji kembali kepermukaan dengan menaburkan uang kepada masyarakat yang menyaksikan pelarungan sesaji, dengan tujuan memeriahkan acara petik laut, kemudian setelah selesai proses penaburan uang, maka selesai pula acara petik laut tersebut.

B. Pandangan Tokoh Agama

¹⁹ Sastra putra, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019.

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Tradisi yang pada dasarnya dilarang yakni tradisi yang di dalamnya terdapat perkara bertentangan dengan syariat. Sehubungan dengan hukum pelaksanaan pelepasan larung sesaji dalam penerapan

²¹ Sarwoko, Wawancara Situbondo 4 September 2019.

“Penerapan petik laut Daerah pesisir Besuki ini walau di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelaksanaan menyimpang dari Syariah, masih tetap termasuk tradisi yang boleh diterapkan karena dalam perubahan zaman kezaman tradisi petik laut termasuk tradisi yang sangat melekat dengan perkembangan budaya, dan juga dapat dikatakan sebagai momen dakwah, di gambarkan terhadap bolehnya pelaksanaan Maulid Nabi yang saat ini boleh diterapkan atas dasar momen dakwah. Momen dakwah dalam upacara petik laut diantaranya seperti menunjukkan terhadap masyarakat tentang adanya rasa syukur atas karunia Allah SWT, bahwa ikan yang berada dalam laut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena karunia Allah SWT. Yang tidak diperbolehkan adalah pelepasan larung sesaji yang terkadang berdampak munculnya kepercayaan yang mendekati musyrik, seperti halnya khawatir jika tidak dilaksanakan adanya pelepasan sesaji ini mengakibatkan kurangnya penghasilan pangan kedepannya.”²²

Salah satu tujuan dalam tradisi petik laut adalah menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat, menambahkan kekompakan

[illegible]

masyarakat, membangkitkan rasa kekeluargaan masyarakat, memunculkan semangat baru bagi masyarakat nelayan, dan juga menjadikan salah satu hiburan tersendiri oleh masyarakat sekitar.²³

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sarwoko
menyampaikan:

“Perubahan masa kemasa memiliki kemajuan yang sangat cepat, jika tradisi seperti petik laut tidak dipertahankan dan kemudian dihilangkan sedikit demi sedikit maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kemusnahan dalam masyarakat.”²⁴

Adat yang berkembang di kalangan masyarakat adakalanya adat yang baik dan juga adapula yang buruk, dalam teori hukum Islam, adat yang diperbolehkan hanya adat yang baik saja, sedangkan adat yang buruk harus ditinggalkan.²⁵ Islam adat yang baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.²⁶

Pelaksanaan upacara petik laut jika dilihat dari segi kebudayaannya, dalam Islam memperbolehkan praktik pelaksanaan petik laut ini, dikarenakan adat perayaan petik laut adalah adat istiadat yang di dalam prinsipnya terdapat banyak masalah,²⁷ mengingat bahwa adanya hukum *‘Urf* yakni suatu adat kebiasaan

²³ Sarwoko, Wawancara Situbondo 4 September 2019.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Abdul Wahhaddb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,.... 89.

²⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,... 78.

²⁷ Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 September 2019

yang bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Sebagaimana dalam Kaidah Fiqhiyah:²⁸

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Metode istinbat yang digunakan untuk mengetahui hukum dari pelaksanaan petik laut ini menggunakan metode *Istislāhī*, berdasarkan dengan metode yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penggalian hukum. Sarwoko selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki mengatakan:

“Dalam hal ini juga menggunakan metode *Istislāhi*, karena beberapa hal, diantaranya melihat perkembangan masyarakat Besuki dari tahun ketahun yang sangat membaik, dan juga karena dalam pelaksanaan petik laut ini sendiri jika dihilangkan akan mengakibatkan kemusnahan pada masyarakat, seperti berkurangnya rasa tolong menolong juga berkurangkan kerukunan antar masyarakat nelayan, sedangkan tradisi seperti petik laut ini sangat melekat dengan kebudayaan. Maka dari itu demi kemaslahatan bersama juga melihat dari berubah zaman, hukum dari melaksanakannya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yakni tidak melebihi-lebihkan pelaksanaan petik laut dengan hal-hal yang mengakibatkan masyarakat nelayan beranggapan jika tidak melangsungkan upacara petik laut mengakibatkan akan berkurangnya rezeki yang mereka dapat.”²⁹

Metode *Istislāhi* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.³⁰ Hal ini berarti upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *nas*-nya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...* hlm 418.

²⁹ Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 September 2019.

³⁰ Ibid.,

tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena karunia Allah SWT.”³²

2. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tradisi pelaksanaan upacara petik laut adalah perkumpulan masyarakat nelayan dalam memperingati pernyataan rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT, semacam menyaksikan acara pelarungan sesaji yang sudah membudaya dikalangan masyarakat Besuki.³³

Menurut Choironi Hidayat selaku tokoh Nahdlatul Ulama juga salah satu takmir Masjid Jami' Besuki,³⁴ mengatakan bahwasanya:

“tradisi itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, jika bertentangan bisa di modif atau disesuaikan. Akan tetapi jika tidak dapat dimodif, maka diamputasi (dihilangkan). Walaupun adat tersebut adalah adat yang secara substansial mengandung banyak manfaat di dalamnya sebenarnya dalam islam tidak dianggap baik, kecuali memang sudah benar benar adat yang tidak mengandung perkara yang menyalai syariat.”³⁵

Berdasarkan penjelasan dalam kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Namun lebih tepatnya mengkhususkan terhadap kaidah sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

³² Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 September 2019.

³³ Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019

³⁴ Choironi Hidayat, Wawancara Situbondo, 4 September 2019

³⁵ Ibid.,

Hukum dari melaksanakan upacara larung sesaji menurut tokoh Nahdlatul Ulama tidak boleh dilakukan, karena khawatir akan munculnya kepercayaan-kepercayaan yang mendekati musyrik, seperti halnya kepercayaan terhadap arwah ghaib penjaga laut. Pelaksanaan ritual upacara petik laut jika dilihat dari teknis pelaksanaannya, termasuk perkara yang mubazir yakni membuang suatu perkara yang seharusnya masih bisa dipergunakan dengan baik. Berdasarkan menurut Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Abdul Jalal³⁹, menyampaikan:

Mubazir adalah menggunakan harta dalam kondisi yang tidak semestinya, atau dalam arti lain mubazir adalah menggunakan harta yang berlebihan untuk membeli apapun yang dilarang oleh Agama.

Dasar hukum yang digunakan terhadap hukum praktik petik laut ini adalah menggunakan ayat al-Qur'an pada surat al-A'rof ayat 31:

³⁹ Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019

[illegible]

**ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI
TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH
BESUKI SITUBONDO**

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan persamaan dari berbagai pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut.

1. Bolehnya melangsungkan acara adat dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat

¹ Abdul Wahhaddb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,.... 89.

baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.²

Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa pada dasarnya hukum dari suatu adat itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat.³ Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa tradisi petik laut hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, jika bertentangan bisa dimodif atau disesuaikan, akan tetapi jika tidak dapat dimodif, maka diamputasi (dihilangkan).⁴ Haram dilakukannya suatu adat ketika dalam melaksanakannya terdapat unsur yang mendekati syirik.

Syirik adalah suatu perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan suatu hal yang lain. Beribadah menyembah dan berdo'a selain kepada Allah yakni meletakkan ibadah bukan pada tempatnya.⁵ Berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.”

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,... 78.

³ Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 September 2019

⁴ Choironi Hidayat, Wawancara Situbondo, 4 September 2019

⁵ Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019

Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa hukum dari melaksanakan larung sesaji itu tidak diperbolehkan, karena khawatir akan munculnya kepercayaan-kepercayaan yang mendekati syirik, seperti halnya kepercayaan terhadap arwah ghaib penjaga laut. Berdasarkan hadist yang dikutip dari *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Ghazali:

Artinya: “orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin”

Tokoh Muhammadiyah mendukung adanya pelaksanaan petik laut karena di anggap pelaksanaan petik laut tersebut sebagai momen dakwah dan juga di dalamnya memiliki banyak masalah.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Namun lebih mengkhususkan terhadap kaidah fikih sebagai

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Tokoh Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih sebagai dasar hukum dari pelaksanaan praktik petik laut, begitu juga dengan tokoh Nahdlatul Ulama sama sama menggunakan dasar hukum kaidah fikih dalam menghukumi praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan perbedaan dari berbagai pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Besuki terhadap pelaksanaan upacara petik laut di Daerah Besuki Situbondo

- Tradisi petik laut yang pada dasarnya dilarang karena di dalamnya terdapat perkara bertentangan dengan syariat itu tetap boleh dilakukan dengan syarat dalam pelaksanaan pelepasan sesaji tidak berdampak munculnya kepercayaan mendekati syirik, karena menurut tokoh Muhammadiyah di dalam pelaksanaan upacara

Upacara petik laut juga diperbolehkan karena merujuk pada kebolehan nya melaksanakan Maulid Nabi. Pelaksanaan Maulid Nabi yang saat ini kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar pada zaman Nabi tidak ada pelaksanaan yang menjelaskan akan hal itu, kemudian di zaman sekarang dibolehkan melaksanakan Mualid Nabi karena dijadikan sebagai momen dakwah. Begitu juga upacara petik laut, dapat dibolehkan melaksanakannya karena dijadikan sebagai momen dakwah.

- b. Menggunakan kaidah fikih dalam menghukumi pelaksanaan upacara petik laut.

Dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dalam memecahkan hukum upacara petik laut adalah kaidah fikih yakni:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

[illegible]

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Dalam kaidah di atas tokoh Muhammadiyah menafsirkan bahwa upacara petik laut adalah suatu adat yang dalam penerapannya masih terdapat unsur menyalai syariat, akan tetapi menurut tokoh Muhammadiyah tetap boleh diterapkan, karena di dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak unsur masalah, yakni dengan adanya pelaksanaan upacara petik laut dapat menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar masyarakat nelayan, dapat menumbuhkan kerukunan antar masyarakat nelayan, dapat dijadikannya sebagai momen dakwah yang ditujukan terhadap masyarakat sekitar, bahwa kita sebagai makhluk Allah SWT seharusnya menyampaikan rasa syukur kita atas semua yang telah didapat dengan cuma-cuma.

[illegible]

Praktik petik laut menggunakan metode *Istislāhī* karena pada zaman dahulu tidak ada hal yang menjelaskan tentang adanya pelaksanaan upacara seperti petik laut, hingga dalam memutuskan hukum dari pelaksanaan upacara petik laut, tokoh Muhammadiyah melihat hal baik dan buruknya faktor yang akan didapat setelah penerapan tersebut, kemudian melihat dari hasil pelaksanaan upacara petik laut di Daerah Besuki yang dari tahun ketahun menjadikan banyak hasil baik dikalangan masyarakat sekitar.

Tokoh Muhammadiyah juga menggunakan metode qiyas, yakni diqiyaskan terhadap pelaksanaan Maulid Nabi, bahwa pelaksanaan Maulid Nabi dan pelaksanaan petik laut pada zaman Nabi sama sama belum pernah ada, kemudian tidak ada hadis yang menjelaskan tentang kebolehan atau tidak bolehnya melaksanakan Maulid Nabi, maka dalam menentukan hukum dari pelaksanaan Maulid Nabi tersebut dengan dijadikannya sebagai momen dakwah, hingga diperbolehkan untuk dilaksanakan. begitu juga dengan pelaksanaan petik laut.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*,.... 65.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Namun lebih mengkhususkan terhadap kaidah fikih sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:“Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya.

Menurut tokoh Nahdlatul Ulama menafsirkan kaidah diatas adalah Tidak bolehnya melaksanakan upacara petik laut karena di hawatirkan dalam pelaksanaan upacara petik laut imi memunculkan perasaan yang mendekati syirik. Syirik dalam kata lain adalah mempercayakan dirinya kepada selain Allah SWT.

Dasar hukum yang digunakan terhadap hukum praktik petik laut ini juga menggunakan dasar hukum hadist yang dikutip dari Ihya' Ulumuddin karya Imam Ghazali:

Artinya: “orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin”

Metode istinbat yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama dalam memecahkan hukum upacara petik laut menggunakan Metode *Qauliy* yakni mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada teksnya.¹⁰ Menurut tokoh Nahdlatul Ulama karena pelaksanaan upacara petik laut sudah ada dasar hukumnya yang menunjukkan bahwa dilarangnya melakukan suatu adat yang mana dalam kegiatan adat tersebut terdapat perkara yang menyimpang dari syariat.

1. Analisis Metode Istinbat Muhammadiyah

¹⁰ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Mctodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail ...* 196.

Tokoh Muhammadiyah Juga mengatakan bahwa hukum diperbolehkannya melaksanakan praktik petik laut karena beberapa hal, diantaranya melihat perkembangan masyarakat Besuki dari tahun ketahun yang sangat membaik, dan juga karena dalam pelaksanaan petik laut ini sendiri jika dihilangkan akan mengakibatkan kemusnahan pada masyarakat, seperti berkurangnya rasa tolong menolong juga kerukunan antar masyarakat nelayan, sedangkan tradisi seperti petik laut ini sangat melekat dengan kebudayaan. Maka tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *Istislāhi* dalam kebolehan pelaksanaan praktik petik laut.

Metode istinbat yang sesuai dengan hukum praktik petik laut ini adalah menggunakan metode *Istislāhi* saja, jika kita melihat dari

- Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama. 2007.
- Hamsah F. *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Hasan Hitu, Muhammad. *Uṣūlu al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: Jamī'u al-Huqūq Mahfūzatu Linnāsir. 2000.
- Hasbiyallah. *Fikih dan Ushul Fikih*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010.
- Hidayat, Choironi. Wawancara. Situbondo. 4 September 2019.
- Hostifawati. "Syukuri Hasil Tangkapan Masyarakat Probolinggo Gelar Petik Laut". Kabarpas.com. Probolinggo. diakses pada 16 September 2019.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman. 2007.
- Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Jalal, Abdul. Wawancara. Situbondo. 27 Agustus 2019.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. *Metodologis Istimbath Muhammadiyah dan Nu: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Batsul Masail*. Analisis. Volume 7 Nomor 2. Sya'ban 1434/ 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fiqr. 1978.
- Kholis, Muhammad. *Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi*. Skripsi. Surabaya: UIN Surabaya. 2015.
- Khollaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dn Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajagrafindo Pranada. 2011.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum Surabaya*: Hilal Pustaka. 2013.

- Muhammad Subhan. *Wawancara*. Situbondo. 25 Agustus 2019.
- Mukhlis, RSP's, "*Analisis Komparatif*", diakses pada 05 mei 2013.
- Mungin, M. Burhan. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Muthmainnah, Rina. *Skripsi : Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.
- Panjalu, Gandhung Fajar. *Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Tesis. Surabaya: UIN Surabaya. 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008).
- Rifa'i, Muhammad. "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat". Portal Indonesia Pengupas Berita Seputar Fakta. diakses pada Senin 25 Maret 2019.
- Rofii, Ahmad. *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2010.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fikih*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Romli Sa. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana. 2017.
- Saebeni, Beni Ahmad Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sakdiyah, Halimatus. "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid". Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Jakarta. 2019.
- Sarwoko. *Wawancara*. Situbondo. 26 Agustus 2019.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana: 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

